KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Anggota DPR masih Ingin Berkantor di Jakarta
Tanggal : Selasa, 19 Maret 2024
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

Anggota DPR masih Ingin Berkantor di Jakarta

Anggota Komisi II DPR mengusulkan gedung DPR menjadi bangunan lembaga publik yang dibangun paling terakhir di IKN.

Fachri Audhia Hafiez
redaksi@mediaindonesia.com

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) belum sepakat untuk memindahkan seluruh kegiatan dan aktivitas ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Bahkan muncul pemikiran untuk menjadikan Jakarta sebagai kota legislasi meskipun ibu kota negara resmi pindah ke Nusantara.

"Tadi diskusi di fraksi terus dengan beberapa *semen* juga terkait dengan DIM (daftar inventarisasi masalah) 572 sebenarnya sudah memayungi semua. Bahwa terkait dengan kesiapan pindah ke IKN itu menyesuaikan dengan kondisi lapangan," kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi dalam rapat Rancangan Undang-undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) di kompleks gedung parlemen, Jakarta, kemarin.

DIM 572 sejatinya menyebutkan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan/atau kenegaraan termasuk tempat kedudukan lembaga negara, lembaga, dan organisasi lainnya dapat dilaksanakan atau berkedudukan di wilayah DKJ.

Hal itu menyesuaikan dengan tahapan yang tertuang dalam peraturan presiden yang mengatur perincian rencana induk IKN. Bahkan, pria yang akrab disapa Awiek itu mengaku tebersit untuk menjadikan DKJ sebagai kota khusus legislasi.

"Saya sempat berpikir begini tadi, kalau sekalian dibikin kekhususan, bisa, *nggak*, misalkan di DKJ itu termasuk juga kekhususan menjadi ibu kota legislasi, parlemen," ucap Awiek. Meskipun demikian, lanjut Awiek, nantinya aktivitas parlemen tetap ada di IKN.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengakui pemerintah tidak sependapat dengan DPR. IKN, kata dia, sudah dikonsep tidak hanya dijadikan pusat pemerintahan.

"Izinkan pemerintah berbeda pendapat. Dalam hal ini kami menurut pemerintah, jangan biarkan kami saja di sana. Kita itu harus bersama dalam konteks negara kesatuan," ucap Suhajar.

Dalam rapat yang berbeda, anggota Komisi II DPR Wahyu Sanjaya mengusulkan gedung DPR menjadi bangunan lembaga publik yang dibangun paling terakhir di IKN.

"Kalau perlu yang paling pojok dan paling kecil pun, tidak masalah, tetapi terakhir sekali saja itu," kata Wahyu saat rapat kerja Komisi II DPR bersama Otorita IKN di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan berdasarkan pemantauannya terakhir, area yang akan dibangun gedung DPR di IKN itu pun belum digaraf. Artinya, pembangunan gedung DPR di IKN bakal dilakukan pada tahap selanjutnya.

"Kalau tahap pertama ini, kan, sampai 2024, mungkin tahap kedua," kata Doli seusai memimpin rapat tersebut.

Satu putaran

Dalam rapat RUU DKJ juga disepakati bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur dipilih melalui pemilihan gubernur (pilgub). Selain itu, Pilgub DKJ disepakati berlangsung hanya satu putaran dengan memperhatikan perolehan suara terbanyak.

"Di UU DKI (Jakarta) sekarang, pemenang pilkada itu sama dengan pemenang pilpres, 50% plus 1. Sekarang di usul pemerintah tidak menyebut 50% plus 1, itu artinya sama dengan pilkada-pilkada yang lain. Suara terbanyak," kata Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Atgas.

Dia mengatakan hal itu sudah dipertimbangkan menyangkut situasi politik pada Pilkada DKI Jakarta pada 2017. Pada Pilkada DKI Jakarta 2017, Anies Baswedan memenangi kursi Gubernur DKI Jakarta dalam dua kali putaran.

"Artinya juga ini tentu sudah mempertimbangkan, menyangkut soal pembelahan, aspek sosiologisnya, pembiayaannya, karena kalau sampai dua putaran, seperti yang terjadi pada 2017, kan, dua putaran. Sekarang konsekuensinya, siapa yang pemenang langsung selesai," ucap Supratman. (Ant/P-2)